

DAFTAR PUSTAKA

- Angggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak*.
<https://www.pajak.go.id/id/kode-akun-pajakdan-kode-jenis-setoran-pajak>
- Goldratt, E. M. (2004). *The Goal : A Process of Ongoing Improvement*. Pearson Education.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia.
- Kementerian keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *UU APBN dan Nota Keuangan 2021*.
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu-apbn-dan-nota-keuangan-2021/>
- Kementerian Keuangan republik Indonesia. (2000). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta:Andi.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP368/PJ/2020*.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Purwanto. (2014). *Modul Pajak Penghasilan*. Widyaiswara Muda Pusdiklat Pajak.

- Sandra. (2021). *Mengenal Fungsi Pajak di Indonesia*.
<https://www.pajakku.com/read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-di-Indonesia>
- Santoso, Y. I. (2020). *Tahun depan, target setoran PPh pasal 23 tumbuh paling tinggi*.
<https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-depan-target-setoran-pph-pasal-23-tumbuh-paling-tinggi>
- Setiawan, B., & Fitriandi, P. (2019). *Kupas Tuntas PPh Potput* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Solikhah, N. (2020). *Tinjauan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 23 oleh Bendahara KPP Pratama Semarang Timur*.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulvina, S., Aribowo, I., & Bandiyono, A. (2017). *Pengantar Hukum Pajak*.